

SABTU, 29 APRIL 2017

Kemenlu Bebaskan 339 WNI dari Hukuman Mati

SEMARANG - Sampai Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri berhasil membebaskan 339 WNI yang menjadi TKI dan imigran dari hukuman mati di sejumlah negara. Dari jumlah tersebut, kasus terbesar di Malaysia yaitu 223 buah, Arab Saudi 70 kasus, Tiongkok 37 kasus, Iran 3 kasus, Thailand 3 kasus, Singapura 3 kasus, Laos dan Brunei 4 kasus.

Hal tersebut disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam orasi ilmiah kuliah umum dengan topik "Perlindungan Warga Indonesia di Luar Negeri Problem dan Prospek" di gedung teater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Jumat (28/4).

Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa dan dosen Departemen Hubungan Internasional. Menurut Iqbal, yang banyak terjadi saat ini adalah WNI yang berada di luar negeri memerlukan perlindungan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Kasus yang paling banyak

menjerat WNI adalah narkoba 112 kasus, pembunuhan 54 kasus, zina 8 kasus, sihir 5 kasus, penculikan 4 kasus, dan senjata api 4 kasus," ungkapnya.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap WNI harus mempertimbangkan hukum internasional. "Konflik yang sering terjadi adalah benturan antara hukum nasional dan hukum internasional," tambahnya

Tugas Negara

Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri mulai digencarkan sejak kepemimpinan Joko Widodo. Isu perlindungan warga negara dianggap perlu diperhatikan tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh negara di belahan dunia.

Dia menggambarkan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program perlindungan warga negara dalam bentuk diplomasi.

Tugas negara yang pertama adalah memastikan warga negara Indonesia memiliki pembela. Dalam semua masalah warga negara di negara lain, negara harus turun tangan.

Perlindungan WNI merupakan kewajiban konstitusional dan diberikan dengan cara-cara yang mencerdaskan, yaitu *protecting and educating*.

"Yang terakhir dalam perlindungan adalah tidak adanya pemindahan atau pengambilalihan tanggung jawab," jelasnya.

Dia juga mengaggas bahwa negara perlu fokus pada upaya perbaikan sistem untuk meningkatkan *performance*, karena jika tidak ada sistem yang baik maka selamanya negara akan terjebak ke dalam pola perlindungan warga yang tidak memberikan hasil maksimal. Pada tahun ini akan diluncurkan aplikasi bernama *safe travel* yang dapat memberikan informasi terkait dengan negara tujuan.

"Ini untuk memberikan kemudahan dan keamanan selama berada di luar negeri, Khususnya pada negara dengan standar keamanan yang rendah, maka akan sangat membantu warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan di luar negeri. Aplikasi ini bisa diakses melalui smartphone, akan diluncurkan Juli mendatang." (G2-39)



SAMPAIKAN PAPARAN : Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Lalu Muhammad Iqbal saat memberikan orasi ilmiah Kuliah Umum dengan topik "Perlindungan Warga Indonesia di Luar Negeri Problem dan Prospek" di gedung teater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Jumat (28/4). (66)

SM/dok